

Internalisasi Nilai Nilai Pancasila Dan Nasionalisme

Prosiding Konferensi Nasional Hak Asasi Manusia, Kebudayaan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19: Tantangan untuk Keilmuan Hukum dan Sosial Volume 1

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia di era globalisasi dan Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) dewasa ini tidak bisa menghindarkan diri dari hubungan dengan budaya dari luar. Jika masyarakat tidak selektif dan kurangnya kesadaran terhadap kebudayaan yang telah dimilikinya, maka jati diri kebudayaannya yang dimiliki baik lokal maupun nasional lambat laun akan pudar. Sebaliknya jika masyarakat memiliki kesadaran budaya, ketahanan budaya, kemampuan melestarikan dan menjaganya maka budaya luar dapat dijadikan sebagai unsur pendorong kebudayaan ke arah yang lebih maju dan modern. Bangsa Indonesia memiliki kesenian lokal dan nasional yang beraneka ragam yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, salah satunya yaitu kesenian Dongrek. Kesenian ini merupakan kesenian tradisional khas Kabupaten Madiun yang hingga kini masih didukung oleh masyarakat Madiun tentunya dengan nilai-nilai budaya yang mendorongnya.

"Buku Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi". Tujuan penyusunan, penulisan buku dimaksudkan semoga bisa menjadi alternatif literatur matakuliah Pendidikan Pancasila, untuk pendalaman dan perluasan materi, sehingga ketika diskusi terhadap masalah-masalah aktual, materi dalam buku ini hendaknya sudah dibaca, dipahami dan siap menjadi bahan penunjang untuk kegiatan diskusi dalam perkuliahan. Bahan-bahan penyusunan buku ini merujuk pada buku-buku acuan wajib dan penunjang Pendidikan Pancasila dan disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi dewasa ini. Buku sederhana ini mudah-mudahan dapat memberikan manfaat, baik bagi kami sendiri maupun bagi para mahasiswa yang mengikuti kuliah Pendidikan Pancasila di lingkungan Universitas Alma'Ata Yogyakarta. Tentunya buku ini banyak sekali kekurangannya, oleh karena itu saran dan kritik kami harapkan dari para pembaca buku ini. Terlebih uapan terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya buku ini.

Penyusunan buku Pendidikan Kewarganegaraan ini mengacu pada Undang- Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 yang menempatkan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai bagian dari komponen Mata Kuliah Inti (MKI) dalam kurikulum pendidikan tinggi dan keputusan Departemen Pendidikan Nasional tentang Pendidikan Kewarganegaraan yang tertuang dalam keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi No. 038/Dikti/Kep./2002 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Mutu Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) di Perguruan Tinggi. Buku persembahkan penerbit PrenadaMedia

""Saya Joko Widodo, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirahim telah menerima munda dari Ibu Megawati Sukarnoputri Ketua Umum PDI Perjuangan sebagai calon Presiden RI. Untuk melapangkan jalan kemenangan menuju Pilpres, mari bersama-sama bergotong-royong Bekerjalah dengan santun, tetap rendah hati, jangan sakiti yang lain dan jaga TPS dari kecurangan. Jangan terlena dan seolah-olah sudah menang, terus bekerja keras. Semoga Tuhan meridhoi langkah kita. Amin Jakarta, 19 Maret 2014 Jokowi""

Tantangan terhadap Pancasila memang berasal baik dari ideologi sayap kanan maupun sayap kiri. Hanya saja, konflik Pancasila dengan agama adalah yang paling memiliki dinamika panjang. Bagi beberapa kelompok agama di Indonesia, selalu ada garis demarkasi yang memisahkan Pancasila dengan agama. Di beberapa ormas Islam, hal demikian itu bukan hanya bersifat politis tetapi juga ideologis. Ada landasan keyakinan dan pemahaman keagamaan yang membuat nilai-nilai Pancasila tidak dapat berjalan beriringan dengan agama. Bagi manusia-manusia Indonesia sebagai suatu bangsa, persoalan ini tentu sangat pelik karena membawa eksese negatif terhadap stabilitas politik dan dapat menjadi ancaman bagi integrasi yang telah lama terbentuk. Apa yang dihadirkan dalam buku ini adalah mencoba mencari titik keseimbangan antara nilai-nilai agama yang bersifat transenden dan nilai-nilai Pancasila yang bersifat imanen. Untuk melakukannya, memang tidak dapat dilepaskan dari penafsiran terhadap sila-sila dalam Pancasila, yang dalam hal ini penafsirannya mutlak membutuhkan berbagai perangkat ilmu pengetahuan, mulai dari ilmu bahasa, politik, ideologi, sosiologi, hukum, sejarah, sampai filsafat. Dengan demikian, apa yang ditemukan setidaknya dapat menjadi diskursus, analisis serta refleksi di tengah kehidupan beragama bangsa Indonesia yang selalu dinamis.

Materi yang disusun dalam buku ini sangat kontekstual dan diupayakan sesuai dengan tema-tema kajian yang telah disepakati oleh para dosen matakuliah Pendidikan Pancasila namun secara lebih khusus dalam buku ini lebih kepada menonjolkan nilai-nilai Pancasila sebagai core value dalam setiap bab yang dipaparkan dalam buku ini. Demikian, kami masih merasakan perlunya penajaman pembahasan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan kehidupan masyarakat, muatan kandungan, dan inti nilai dalam setiap kajian. Kami mengupayakan pembahasan setiap bab-bab berbasis pendekatan nilai-nilai Pancasila.

Buku Membangun Kedaulatan Bangsa Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila: Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kawasan Terluar, Terdepan, dan Tertinggal (3T) (Kumpulan Makalah Call for Papers Kongres Pancasila VII) berisi kumpulan makalah peserta Kongres Pancasila VII yang diselenggarakan tanggal 31 Juni - 1 Mei 2015 di Yogyakarta atas kerjasama Pusat Studi Pancasila UGM dengan Universitas Mulawarman. Makalah-makalah tersebut memuat paparan dengan tema "Membangun Kedaulatan Bangsa Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila: Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kawasan Terluar, Terdepan, dan Tertinggal (3T)" dengan sub tema 1). Kedaulatan Politik: Penguatan Ideologi Pancasila di Kawasan 3T, 2). Kedaulatan Ekonomi: Penguatan Kebijakan Pengelolaan Kawasan 3T, 3). Kepribadian dalam Kebudayaan dan Pendidikan: Penguatan Kedaulatan Bangsa di Kawasan 3T. Agar berbagai pemikiran dan pendapat yang berkembang selama Kongres Pancasila VII dan kesepakatan peserta kongres dapat disebarluaskan kepada masyarakat, penyelenggara menyepakati untuk menerbitkan makalah-makalah dalam bentuk buku, agar kegiatan tersebut dapat didokumentasikan dengan sistematis agar tetap dapat dibaca walau kegiatan sudah lama berlalu. Kami mengucapkan terimakasih kepada Rektor Universitas Gadjah Mada, Senat Akademik (SA) UGM, Sekertariat Eksekutif UGM, Direktorat Kerjasama UGM, Direktorat Penelitian UGM, Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat UGM, Fakultas Filsafat UGM, Kedaulatan Rakyat atas terselenggaranya Kongres Pancasila VII. Kami juga mengucapkan terimakasih kepada tim

penyusun buku makalah call for papers kongres Pancasila VII yang telah bekerja dengan keras dan cermat dalam menyusun buku ini. Semoga Buku ini bisa menjadi tambahan referensi dalam memperkaya kajian tentang Kedaulatan Bangsa Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila.

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penyusunan buku ajar yang berjudul Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ini dapat diselesaikan dengan baik. Hal tersebut tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak yang mengharapkan adanya buku ajar ini sebagai panduan pembelajaran mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Universitas Sembilanbelas November Kolaka. Buku yang tengah ada dihadapan pembaca saat ini adalah kumpulan materi-materi ajar, baik itu mata kuliah Pancasila maupun mata kuliah Kewarganegaraan. Disusunnya bahan ajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ini diharapkan dapat menjadi opsi referensi bagi para dosen/pendidik dan mahasiswa dan civitas academica yang ada di Universitas Sembilanbelas November Kolaka pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku ini. Akhirnya, harapan penulis sejak lama dapat terwujud dengan hadirnya buku ajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ini sebagai panduan perkuliahan mata kuliah PPKn. Sebagaimana penyusunan buku ajar yang lain, penulis menyadari bahwa buku ini belumlah sempurna baik dari materi dan susunannya. Dengan lapang dada dan kerendahan hati, penyusun bersedia untuk diberi saran dan kritik yang bersifat membangun guna memperbaiki buku ini agar lebih baik lagi. Kapital multikultural pesantren ini diharapkan dapat menambah khazanah baru bagi diskursus pendidikan multikultural. Kajian ini juga membuka kesadaran bahwa soal keragaman, pesantren sebenarnya memiliki kapital multikultural yang berharga dan bisa didayagunakan sebaik mungkin untuk mengambil peran dalam membangun kehidupan multikultural.

Proses internalisasi nilai karakter Hindu pada Anak Usia Dini di Taman Kanak-Kanak Jambe Kumara Kabupaten Gianyar dilakukan oleh pihak sekolah melalui kegiatan pembiasaan, keteladanan (modeling), pengembangan budaya sekolah serta kegiatan ekstra kurikuler. Hambatan yang dihadapi oleh guru PAUD dalam menginternalisasikan nilai karakter Hindu pada anak usia dini di Taman Kanak-Kanak Jambe Kumara adalah (1) Faktor internal meliputi faktor fisiologis dan biologis serta faktor psikologis, (2) Selain faktor internal, faktor eksternal juga dapat mempengaruhi proses penerapan karakter Hindu pada anak. Faktor eksternal yang mempengaruhi internalisasi nilai karakter yaitu faktor dari keluarga, faktor lingkungan pendidikan dan faktor lingkungan masyarakat. Upaya untuk mengatasi hambatan yang dihadapi guru PAUD dalam menginternalisasikan nilai karakter Hindu pada anak usia dini yaitu dengan pengembangan kultur sekolah (caring community) dan pengembangan pendidik yang profesional. Dampak internalisasi nilai karakter Hindu pada anak usia dini Taman Kanak-Kanak Jambe Kumara Kabupaten Gianyar yaitu (1)Terbentuknya karakter anak usia dini yang religius (sraddha), (2)Terbentuknya karakter anak usia dini yang disiplin (yoga sadhana), (3) Terbentuknya karakter anak usia dini yang mandiri (rtvig rtvijam), (4) Terbentuknya karakter anak usia dini yang ramah tamah (samiksantam).

Buku yang ada di tangan pembaca ini merupakan hasil riset tentang pengaturan syarat-syarat untuk menyatakan debitor pailit sebagaimana, diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yang sama sekali tidak memperhitungkan kondisi kemampuan debitor (solvabilitas) dalam membayar utang-utangnya untuk menyatakan debitor pailit padahal pengertian umum pailit menunjuk kepada kondisi debitor yang tidak mampu membayar utangnya lagi (insolvensi). Persyaratan untuk menyatakan debitor pailit yang hanya mendasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU secara tidak langsung, dapat mengganggu berlakunya asas kelangsungan usaha. Padahal penormaan asas kelangsungan usaha disebutkan sebagai dasar dari pengaturan Hukum Kepailitan Indonesia, sebagaimana diatur dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Ketiadaan metode Uji Insolvensi, juga menjadi kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Padahal dengan menerapkan metode Uji Insolvensi sebelum permohonan pailit diperiksa oleh hakim dapat melindungi debitor. Asas kelangsungan usaha dalam penerapan perkara pailit masih sering terabaikan, mengingat Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menitikberatkan asas tersebut pada proses pemberesan harta debitor pailit setelah pernyataan pailit diucapkan. Kondisi tersebut menimbulkan keniscayaan, bahwa hakim dalam perkara niaga tidak pernah mempertimbangkan asas kelangsungan usaha dalam pertimbangan untuk menjatuhkan putusan pernyataan pailit. Padahal nyata-nyata menempatkan debitor yang perusahaannya masih memiliki prospek bisnis dan solvabilitas yang baik dalam keadaan pailit akan banyak menimbulkan kerugian bagi debitor.

Pada Era Revolusi Industri 4.0 Ini Indonesia Sedang Mengalami Bonus Demografi Yang Cukup Baik, Oleh karena itu harus dimanfaatkan dengan baik dan benar untuk mencapai tujuan Indonesia emas pada tahun 2045. Salah satunya adalah dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia agar dapat berdaya disegala aspek penting bangsa ini yakni aspek Pendidikan, Ekonomi, Politik, dan Sosial Budaya. Merespon akan hal tersebut, buku ini berisi tentang gagasan atau ide ide segar yang mendukung aspek yang disebutkan sebelumnya dari kaum milenial dan Generasi Z yang merupakan representasi dari Bonus Demografi itu sendiri. Diharapkan para pembaca dapat terinspirasi dari gagasan yang diberikan dari para penerus bangsa ini, terutama pemerintah, agar niat baik berupa ide dari para penulis dapat diimplementasikan untuk pembangunan bangsa yang lebih baik lagi kedepannya untuk Indonesia Emas 2045. [Fianosa Publishing, Indonesia, Ebook, Digital]

Buku ini adalah buku yang memberikan jawaban atas kegaugalan sosial yang terjadi di masyarakat, lebih-lebih masyarakat kampus seperti Jurusan Pendidikan Olahraga dan Kesehatan (JPOK) Program Studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi (PJKR) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Lambung Mangkurat Banjarbaru.

Philosophy of law.

Buku ini merupakan bahan bacaan bagi mahasiswa untuk matakuliah Pendidikan Pancasila. Sengaja disebut sebagai bahan bacaan, karena nilai - nilai yang ada dalam Pancasila tidak bisa direduksi dalam rumusan-rumusan baku, melainkan harus digali terus menerus melalui bacaan - bacaan dan pengalaman konkret di lapangan. Dengan upaya ini nilai-nilai Pancasila yang diterima oleh generasi bangsa menjadi sesuatu yang hidup. Buku ini dapat menambah referensi bagi mahasiswa dan dosen pancasila. Buku ini menawarkan keteladanan tokoh-tokoh berkarakter, terkategori dalam kelima sila masing-masing. Tokoh-tokoh seperti Bung Karno, Bung Hatta, Sjafruddin Prawiranegara, merekalah sebagian contoh sumber mata air keteladanan Pancasila dalam perbuatan. Pembinaan dan pengembangan karakter tidak hanya dalam pengetahuan, tetapi dalam perbuatan. Merekalah sosok-sosok yang menghargai perbedaan, manusiawi dan santun, mencintai tanah airnya, demokratis, adil dan solider. [Mizan, Expose, Politik, Sosial, Kebudayaan, Sejarah, Pancasila, Tanah Air, Dewasa, Indonesia]

Javanese aspect in spiritual life of Susilo Bambang Yudhono, the Indonesian president.

Buletin Perpustakaan Bung Karno. Th. XI / Vol. 1 / 2019

Pancasila sebagai ideologi negara dan bangsa memiliki kesejarahannya sendiri. Sejak perumusan di BPUPKI hingga masa paska Reformasi, telah muncul berbagai tafsir dan penjabaran strategis atas nilai-nilai Pancasila. Pada masanya, tafsir Pancasila pernah terseret dalam pertentangan ideologis yang nyaris memecah belah bangsa, sebagaimana terjadi pada masa Konstituante hingga tragedi bangsa di tahun 1946/ Belajar dari konflik ideologi di masa sebelumnya, rezim Orde Baru kemudian mengedepankan pembangunan ekonomi dengan menekan secara kuat konflik-konflik ideologis dengan menggunakan jargon Pancasila dala sebagai azas tunggal. Lepas dari represi ideologis dengan tafsir tunggalnya, bangsa Indonesia masuk dalam euforia kebebasan, yang juga berimbas pada terpinggirkannya Pancasila dalam wacana kehidupan bernegara dan berbangsa. Bahkan sampai pada detik ini kemerdekaan yang kita peroleh masih bersifat "semu". Secara prinsipal, bangsa ini masih terjajah dalam semua bidang baik politik, pendidikan, ekonomi dan kebudayaan.

Kongres Pancasila IV ini merupakan rangkaian dan kesinambungan dari Kongres Pancasila sebelumnya, yaitu Kongres Pancasila I tgl 1 Juni 2009 di Yogyakarta; Kongres Pancasila II tgl. 1 Juni 2010 di Denpasar; dan Kongres Pancasila III tgl.1 Juni 2011 di Surabaya. Dari tiga kali Kongres Pancasila tersebut telah banyak dihasilkan rumusan-rumusan deklarasi yang sangat berkualitas dan bermakna. Atas dasar hasil-hasil yang telah dicapai dari Kongres Pancasila sebelumnya itu, maka pada Kongres Pancasila IV kali ini dipilih dan ditetapkan tema "Strategi Pelembagaan Nilai-nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia". Tema ini dipilih dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: Saat ini tidak ada lembaga khusus pengawal Pancasila. Padahal, diakui atau tidak Pancasila adalah dasar Negara Indonesia. Keadaan ini dinilai jauh lebih buruk jika dibandingkan dengan masa sebelum reformasi. Saat itu, MPR mempunyai berbagai wewenang, dan salah satunya "memelihara" Pancasila. Ketiadaan lembaga khusus pengawal Pancasila itu menyebabkan Pancasila kehilangan dasar legitimasi kenegaraannya. Ketiadaan lembaga khusus pengawal Pancasila, berimplikasi pada tidak adanya mekanisme yang jelas dalam mensosialisasikan Pancasila. Peran tersebut saat ini nampaknya berusaha dimainkan oleh MPR dengan slogan kebanggaannya "4 Pilar Hidup Bernegara" yang mensejajarkan posisi Pancasila dengan NKRI, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika. Terlepas dari ketidaktepatan konsep dasar yang ada dalam slogan itu, kita mengakui bahwa MPR memiliki niat baik untuk membumikan Pancasila. Saat ini tidak ada rambu-rambu pengimplementasian Pancasila yang jelas dan baku. Padahal, rambu-rambu itu mutlak diperlukan agar dapat diperoleh hasil yang optimal. Dengan kata lain, rambu-rambu itu perlu segera diadakan. Mempertimbangkan hal-hal diatas, kiranya perlu ada upaya serius untuk membentuk atau menunjuk lembaga khusus pengawal Pancasila, yang nantinya diberi wewenang, antara lain untuk menyusun rambu-rambu pengimplementasian Pancasila tersebut secara tepat, terstruktur, dinamis dankontekstual.

Untuk merawat keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa, diperlukan upaya yang konkret dan sistemik untuk melakukan revitalisasi nilai-nilai dan spirit Wawasan Kebangsaan. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia yang dijiwai nilai-nilai Pancasila Merawat Nilai-Nilai Kebangsaan Dalam Kebhinnekaan di Tengah Covid-19 dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 serta memperhatikan sejarah dan budaya tentang diri dan lingkungan keberadaannya yang sarwanusantara dalam memanfaatkan kondisi dan konstelasi geografi, dengan menciptakan tanggung jawab, motivasi, dan rangsangan bagi seluruh bangsa Indonesia, yang mengutamakan Persatuan dan Kesatuan bangsa serta Kesatuan Wilayah pada penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai Tujuan Nasional.

Pendidikan PancasilaUpaya Internalisasi Nilai - Nilai KebangsaanPenerbit Unika Atma Jaya Jakarta

BAB 1. Dasar-dasar Perekonomian Menurut Pancasila dan UUD 1945	1 ?
Makna Sistem Ekonomi Pancasila.....	2 ?
Makna Pasal 33 UUD 1945	7
Dinamika Kebijakan Fiskal Indonesia	15 ?
Kebijakan Fiskal dalam Perekonomian Indonesia	16 ?
Teori Kebijakan Fiskal	18 ?
Tujuan Kebijakan Fiskal	19 ?
Bentuk – Bentuk Kebijakan Fiskal yang menginternalisasikan nilai-nilai keindonesiaan	22 ?
Macam-macam Kebijakan Anggaran/Fiskal	24
3. Bank Sentral dan Sektor Perbankan	27 ?
Kedudukan Bank Indonesia (BI)	28 ?
Tujuan dan Tugas Bank Indonesia Sebagai Wujud Internalisasi Nilai-nilai Keindonesiaan	30 ?
Tugas Bank Indonesia	32 ?
Peranan Bank Indonesia Dalam Pengendalian Inflasi ...	34
4. Pengangguran, Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi 37 ?	
Pengangguran	38 ?
Kemiskinan	42 ?
Ketimpangan Ekonomi	44
5. Infrastruktur dan Iklim Investasi	47 ?
Pembangunan Infrastruktur	48 ?
Reformasi Birokrasi	49 ?
Investasi	51
6. Kedaulatan Pangan Nasional	53 ?
Sektor Pertanian Indonesia	54 ?
Kendala Pengembangan Sektor Pertanian	57
7. Pembangunan Ekonomi Daerah	59 ?
Ekonomi Daerah	60 ?
Permasalahan dalam Pembangunan Ekonomi Daerah..	63 ?
Peran Pemerintah dalam Pembangunan Ekonomi Daerah	67 ?
Paradigma baru dalam Pembangunan Ekonomi Daerah	70 ?
Strategi dalam Pembangunan Ekonomi Daerah	74

Buku ini memuat elaborasi da eksplorasi pemikiran dan tokoh ketatanegaraan Islam, mulai dari periode Klasik seperti al-Farabi, al-Mawardi, al-Ghazali, Ibn Taimiyah, dan Ibn Khaldun; hingga era Modern seperti Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, Muhammad Iqbal, dan Ayatullah Khomeini untuk menyebut beberapa nama dan juga pemikiran dan praktik politik Islam di Nusantara dari masa kerajaan/kesultanan hingga masa kontemporer; mulai dari Nuruddin ar-Raniry, Raja Ali Haji hingga Mohammad Natsir dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur). --- Buku persembahan penerbit Prenadamedia Kencana

Upaya mempersiapkan generasi bangsa yang cerdas, unggul, bertanggung jawab, serta berdaya saing kuat, maka perlu diberikan pembelajaran tentang pendidikan karakter. Salah satunya melalui Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan diajarkan sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Tujuan akhirnya adalah mampu mengimplementasikan nilai kehidupan yang terkandung dalam materi Pendidikan Kewarganegaraan berdasarkan nilai Pancasila pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Merujuk pada sila pertama "Ketuhanan yang Maha Esa" tentu erat kaitannya dengan agama, Ahlussunnah Wa Jama'ah sendiri merupakan aliran dalam agama Islam. Nilai kehidupan Ahlussunnah Wal Jama'ah dalam bermasyarakat, berbangsa bahkan bernegara sangat relevan dengan nilai Pancasila mengingat pendirian bangsa Indonesia atas rahmat Tuhan, dan Pancasila sendiri merupakan filsafat, ideologi, juga paradigma kehidupan bangsa Indonesia. Perpaduan nilai Pancasila dengan nilai Ahlussunnah Wal Jama'ah akan menciptakan generasi yang berkarakter, berjiwa religius serta mampu

meningkatkan rasa cinta tanah air. Tentunya hal tersebut sangat selaras dengan konsep bela negara pada sistem pertahanan negara yang diajarkan dalam Pendidikan Kewarganegaraan.

Pancasila dirumuskan oleh para pendiri negara (the founding fathers and mothers) yang merupakan kristalisasi nilai-nilai sosial dan budaya nenek-moyang masyarakat dan bangsa Indonesia jauh sebelum Indonesia merdeka. Berbagai nilai positif dari seluruh aspek kehidupan masyarakat sebagai cikal bakal bangsa Indonesia terkristalisasi dalam rumusan Pancasila yang berisi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Sebagai dasar negara Indonesia, Pancasila adalah hanya satu-satunya dan tidak ada pembanding atau tidak ada saingannya dalam negara. Dari dasar negara itu kemudian penyelenggaraan negara dan pemerintahan dijalankan sesuai dengan nilai dan jiwa yang dikandung dalam Pancasila. Demikian pula kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia diimplementasikan dari nilai-nilai dan jiwa Pancasila. Secara substansial, Pancasila sudah final sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa yang sudah selesai dibicarakan, didiskusikan, bahkan diperdebatkan pada saat penggalan dan perumusannya dalam sidang Badan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Penggunaan Pancasila sebagai dasar negara dianggap sebagai tindakan yang tepat, sehingga tidak mendirikan negara agama atau negara berdasarkan agama tertentu. Pancasila akan menaungi seluruh kepentingan masyarakat yang berbeda-beda dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Penerapan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara akan menunjukkan bahwa masyarakat dan bangsa Indonesia menjunjung tinggi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dalam pergaulan masyarakat dan bangsa Indonesia harus selalu dijiwai dan mencerminkan nilai-nilai tersebut. Oleh karena itu, seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia harus memahami dengan baik nilai-nilai tersebut sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga eksistensi dan sekaligus melakukan aktualisasi nilai-nilai tersebut.

The theme of the conference is "Reconstructing Morals, Education, and Social Sciences for Achieving Sustainable Development Goals". This theme was formulated due to several considerations. First, the symptoms of moral decline that have the potential to destroy the nation. Morals guide humanity towards truth and civilization. The phenomenon of the dehumanization process in the industrial era that pushed people to be part of abstract societies tends to ignore humanity. The education process as a humanitarian system is increasingly marginalized, especially during discussions about the industrial revolution 4.0 and Society 5.0. The conference placed six sub-themes for speakers and participants to share ideas, namely: Social Sciences and Laws, History and Cultural Studies, Interdisciplinary Studies, Morals and Humanities, Policy, Politics, and Communication, Education. The committee has received 195 abstracts from prospective speakers. However, there are only 80 abstracts that are eligible to be presented at this conference.

Sebagai falsafah bangsa, Pancasila menjadi bagian terpenting dari perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia sejak era pra kemerdekaan hingga reformasi ini. Dengan demikian, Pancasila harus dijadikan sebagai cara hidup (way of life) seluruh komponen bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kini sudah tidak zamannya, Pancasila hanya diajarkan secara formal dan kaku di bangku pendidikan, namun yang terpenting justru penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mencoba mengungkap seluk beluk Pancasila dalam perspektif seorang santri, mengingat beberapa bagian dari buku ini merupakan hasil dialektika dan diskusi kelas dengan mahasiswa Ma'had Aly Al-Iman Purworejo. Titik tekan buku ini adalah untuk menumbuhkan keyakinan ideologis mahasiswa terhadap Pancasila sebagai falsafah dan dasar negara Indonesia serta membangkitkan (kembali) semangat *hubb al-wathan min al-îmân*, sebagai bagian dari komitmen santri terhadap ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Beberapa riset mutakhir menyebutkan bahwa Pancasila mendapatkan tantangan nyata. Salah satunya adalah radikalisme berbasis keagamaan yang juga menyasar banyak perguruan tinggi. Sebab itulah, perlu diadakan riset terhadap aktualisasi Pancasila di Perguruan Tinggi. Buku ini menyajikan hasil riset mutakhir tentang bagaimana Pancasila diaktualisasikan oleh mahasiswa di dua perguruan tinggi di Lampung, yakni UIN Raden Intan dan Universitas Lampung.

Di tengah arus perkembangan zaman, Pancasila tetap dijaga keberadaannya untuk terus diteguhkan menjadi identitas dan nilai-nilai kebangsaan. Diskursus-diskursus akademik adalah salah satu upaya yang dilakukannya. Diskursus ini terinspirasi dari kegiatan yang dilakukan oleh organisasi pergerakan jaman dulu seperti Budi Utomo, Indonesische Studieclub, dan Algemene Studieclub. Buku ini merupakan pengupayaan akademik yang berkaitan dengan ke-Pancasila-an secara dialogis. Kemudian Pancasila didudukkan sebagai basis moral dari segi pendidikan kemanusiaannya, nilai-nilai kebudayaan dan kecenderungan tantangan yang disebabkan pengaruh globalisasi dan paham-paham internasional. Maka tidak berlebihan jika isi buku ini sangat relevan untuk dapat dijadikan sebagai bahan bacaan bagi para pemerhati kebangsaan dan para Pancasila-lais yang memiliki keberpihakan dan kepedulian terhadap nasib bangsa ini.

Bahasa Teologis Ahlussunah Wal Jama'ah (Aswaja) sangatlah seksi untuk didiskusikan. Apalagi dalam diskursus Islam di dunia, Aswaja kini mendapatkan ujian berat. Banyak negara muslim di Timur Tengah yang mayoritas menganut aliran Sunni tengah dilanda Arabian Spring. Mereka baku hantam sesama muslim dan menjadi bulan-bulanan negeri Barat yang menganggap Islam sebagai "musuh"-nya. Islam yang oleh Barat distigma negatif tentu menjadi objek yang disepelkan, dihina bahkan dicaci maki. Mereka menganggap Islam sebagai agama teroris dan menebar ancaman. Tentu ini salah. Islam tidak seperti yang digambarkan oleh mereka, kaum Barat. Islam Aswaja memiliki konsep ilmiah, amaliah dan harakah yang sangat baik, penebar kedamaian dan tentu saja agama yang benar-benar memanusiaikan manusia dan tak mengizinkan setetes pun darah manusia ditumpahkan. Namun, fakta bahwa peperangan dan perseteruan antara kaum Muslim di negara-negara Islam menjadi validitas dan pembenaran atas tuduhan itu. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan untuk menampilkan Islam yang ramah dan damai. Islam Nusantara yang digagas PBNU adalah solusi. Indonesia telah membuktikan bahwa Islam adalah solusi terbaik bagi Islam dunia untuk meneguhkan kemanusiaan, demokrasi dan peradaban dunia. Islam ala Nusantara yang bukan merupakan aliran atau tipologi baru adalah Islam yang menjunjung tinggi perdamaian, kesetaraan dan tentu saja saling menghormati dan menghargai sesama manusia. Buku ini mengenalkan secara operasional melalui bahasa teologis akan Islam Nusantara yakni Aswaja. Beberapa konsep yang ditawarkan dalam buku ini pun menjadi bagian organik dari Islam Nusantara dan Islam rahmatan lil alamin yang menjadi tulang punggung Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini. Keamanan dan kedamaian negeri ini adalah bukti bahwa Islam Nusantara memiliki kekhasan walaupun harus diuji oleh ragam ras, Bahasa, kelompok, ribuan pulau dan puluhan bangsa. Islam Nusantara dan Aswaja ala Indonesia pun bisa menjadi solusi dunia Islam dalam menghadapi krisis multi dimensi ini. Buku ini pun bisa membantu semua pembaca dalam memahami bagaimana Aswaja dibaca melalui ragam bidang ilmu dan diaktualisasikan dalam ragam konteks kehidupan.

Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang notabene bermeteraikan Pendidikan Moral Pancasila merupakan salah satu pelajaran yang "sangat Urgen" dipelajari oleh segenap warga negara Indonesia umumnya dan oleh generasi muda bangsa khususnya di samping "Pendidikan Agama" guna mengeliminasi riak-riak negatif yang berkontribusi mengusik "Persatuan dan Kesatuan Bangsa" yang sudah lama terbina. Kehadiran buku ini menawarkan alternative untuk menyembuhkan penyakit intoleransi dan inkonsistensi yang mengusik persatuan dan kesatuan bangsa dengan memahami dan memaknai nilai-nilai Pancasila. Pancasila yang termuat dalam Alenia ke IV Pembukaan UUD 1945 merupakan pelajaran yang berfungsi menanamkan Ideology Negara dan nilai-nilai Karakter Bangsa. Pendidikan Pancasila dan UUD 1945 mengemban misi membentuk warganegara Indonesia yang berakhlak mulia, cinta tanah air dan bangsa, menjadi

warga negara yang baik serta bertanggung jawab. Pancasila merupakan jiwa seluruh rakyat Indonesia, yang memberi kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta warta pembimbing dalam mengejar kehidupan yang lebih baik, demi menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Salah satu fungsi Pancasila sebagai dasar negara adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum. Pancasila digunakan sebagai petunjuk arah bagi semua kegiatan atau aktivitas hidup dan kehidupan dalam berbangsa dan bernegara

[Copyright: b24d9e019a04aa68afe9ca2caa4defad](#)